



RENCANA KERJA TAHUN 2023



**DINAS KETAHANAN
PANGAN KOTA BIMA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima 2019-2023 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan ketahanan pangan selama periode 2019-2023 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2023). Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2023 pada akhir tahun anggaran 2023.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan ketahanan pangan Kota Bima.

Kepala Dinas,

Ditetapkan di Raba - Bima
Pada tanggal, Juni 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Bima,


Ichwanul Muslimin. SP, MM
Pembina IV.a
NIP. 19720229 200501 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan perangkat Daerah	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	45
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	47
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	52
BAB V. PENUTUP	64

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun sebagai amanat atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan anggaran. Renja Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2022 merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2013-2023 Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Kota Bima bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan Ketahanan Pangan secara menyeluruh, terpadu, ekonomis, efektif, efisien dan sinergis dengan kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTB, dan Pembangunan Jangka Menengah Kota Bima. Renja Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Kota Bima menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun ke-5 dari RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 yang memfokuskan pada upaya Peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat didukung peningkatan daya saing sumber daya manusia. Tahun ke-5 menjadi tahapan yang penting bagi Pemerintah Kota Bima dalam memantapkan pencapaian target pembangunan jangka menengah dengan mendasarkan hasil evaluasi target dan capaian kinerja tahun 2021, pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022. Untuk mendukung tema pembangunan RKPD tahun 2023 “Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Untuk DISHANPAN Kota Bima program dan kegiatan tahun 2023 difokuskan pada upaya penguatan ketersediaan pangan melaluai cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat, LDPM, membangun Kerjasama dan koordinasi dengan BULOG, Menjaga stabilitas harga pangan melalui penyediaan informasi stok pangan dan evaluasi berkala harga pangan, peningkatan kualitas pengelolaan stok dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, serta penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Renja Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Kota Bima Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) DISHANPAN Kota Bima Tahun 2018-2023. yang memuat prioritas program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang

disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas fungsi perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota Bima tahun 2023 dan hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan DISHANPAN Kota Bima 2022. Renja Perangkat Daerah ditetapkan kepala dinas setelah RKPD ditetapkan. Renja DISHANPAN Kota Bima 2023 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.

1.1.1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Tema Pembangunan

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan agenda kerja dan penyiapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja.

Rancangan awal Rencana Kerja OPD disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, serta berdasarkan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dibahas dalam forum OPD atau forum gabungan OPD.

Hasil kesepakatan dalam pembahasan forum OPD atau gabungan forum OPD tersebut dirumuskan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum OPD/Forum Gabungan OPD dan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja OPD.

Rancangan rencana kerja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi, yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif pada setiap rancangan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Rancangan rencana kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi tersebut kemudian dijadikan bahan untuk merumuskan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah yang kemudian ditetapkan dan disahkan sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Walikota.

A. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, tema RKP 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”** Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2024, yakni meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi.

B. Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tema pembangunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah **“Peningkatan Produktivitas Industri dan Diversifikasi Ekonomi yang Inklusif Untuk Mewujudkan Kegemilangan NTB yang Berkelanjutan”.**

Arah Kebijakan RKPD NTB Tahun 2023 antara lain:

1. Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan capaian vaksinasi, jaminan kesehatan, dan penguatan sektor produktif (pertanian, industri, infrastruktur);
2. **Peningkatan kualitas SDM melalui layanan kesehatan berkualitas, layanan pendidikan, dan pendidikan vokasi;**
3. Peningkatan industrialisasi sektor unggulan daerah melalui pengembangan industri pengelolaan, pengembangan industri kreatif, dan pengembangan ekonomi Hijau-Biru-Sirkular;
4. Perluasan lapangan kerja melalui penyediaan akses lapangan kerja, membangun kemitraan dengan dunia usaha, dan peningkatan investasi;
5. Peningkatan pendapatan daerah melalui pengembangan potensi sumber pendapatan daerah, peningkatan layanan publik, dan peningkatan sarana prasarana;
6. Infrastruktur layanan dasar yang mendukung penanggulangan kemiskinan, industrialisasi, diversifikasi ekonomi, kesiapsiagaan bencana, dan kualitas lingkungan;
7. Target Penurunan kemiskinan menjadi SATU DIGIT dan penanggulangan kemiskinan ekstrim melalui gerakan multipihak.

C. Prioritas Pembangunan Kota Bima

Kebijakan pada RKPD Kota Bima Tahun 2023 memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional untuk tahun 2023 juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah NTB yang tercantum pada RKPD NTB Tahun 2023, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Bima Tahun 2023 adalah: **“Membangun Ketangguhan Untuk Meningkatkan Produktifitas Dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan”.**

Tujuan utama dari usaha percepatan pemulihan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Semua kelompok masyarakat, membutuhkan

memenuhi kebutuhan dasar dan lingkungan yang kondusif untuk melakukan aktifitasnya.

Prioritas Pembangunan Kota Bima difokuskan pada;

- 1). Tata kelola pemerintahan dan pemantapan pelayanan publik;
- 2). Pemulihan Ekonomi;
- 3). Pemantapan sistem kesehatan dan penanganan Covid 19;
- 4). Penanganan kumuh;
- 5). Mitigasi Bencana;

Tabel 1.1
Rencana Program Prioritas Pembangunan Urusan Bidang Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2023

Sasaran RPJMD (Tujuan PD)	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Kegiatan	Sub Kegiatan
2	3	4	5	6
Meningkatnya ketahanan pangan	Pembangunan Kesehatan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
				Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
				Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
				Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan
		Berbasis Sumber Daya Lokal		
		Program penanganan kerawanan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan
				Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
		Program pengawasan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
				Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian				
Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal				
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				

Tabel. 1.2. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah, RKPD, Renstra PD, RPJMD, dan Kementerian Pertanian (Badan Ketahanan Pangan Pusat)

Badan Ketahanan Pangan Pusat		RPJMD Kota Bima 2018-2023				Renstra PD 2018-2023			Prioritas Daerah 2022 (RKPD)	Renja PD	
Misi	Misi	Visi	Misi I	Sasaran	Misi	Tujuan Renstra PD	Sasaran	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Kegiatan
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berlandaskan	1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal 2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan 3. Memperkuat sistem distribusi pangan 4. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal 5. Meningkatkan penanganan keamanan dan mutu pangan segar	Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas yang berdaya saing	Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berdaya saing	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan	1. Meningkatkan Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat	- Persentase Ketersediaan Pangan Utama - Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	Pembangunan Kesehatan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
							2. Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan			- Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
											- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
										Program penanganan kerawanan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
										Program pengawasan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: BKP Pusat, RPJMD, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kota Bima Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 12) Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
- 18) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023;
- 19) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
- 20) Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah tahun 2023 dalam rangka mensinergikan arah dan prioritas pembangunan jangka menengah dengan program dan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan tahunan.

Tujuan, penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai bahan acuan perangkat daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang selanjutnya menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA.

Dapat dikatakan Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam rencana operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah;
4. Sebagai arah/acuan penyusunan dokumen RKA Perangkat Daerah
5. Instrumen bagi pemerintah daerah dan Perangkat Daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
6. Instrumen bagi perangkat daerah dan sebagai acuan dalam penyusunan LPPD dan LKIP Perangkat Daerah;
7. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan.

1.4. Sistematika Dokumen Renja

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun Anggaran 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- BAB V. PENUTUP

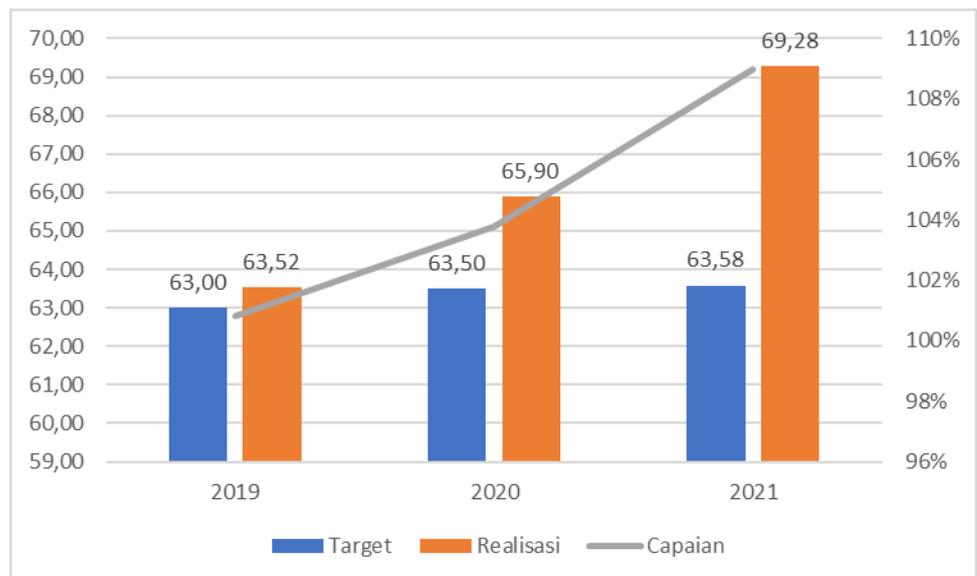
B A B 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2023 dan salah satu sasaran RPJMD yang menjadi tujuan Dinas Ketahanan Pangan untuk mendukung Misi Pertama RPJMD Kota Bima Tahun 2019-2023 adalah Meningkatnya Ketahanan Pangan yang diukur dari nilai Indeks Ketahanan Pangan. Ketahanan Pangan bersifat multi dimensi, sehingga penilaian situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Di tahun 2018- 2021 capaian indikator Indeks Ketahanan Pangan Kota Bima adalah:

Gambar 2.1
Target dan Capaian Indikator Tujuan (Meningkatnya Ketahanan Pangan, Indikator Tujuan Indeks Ketahanan Pangan)



Sumber Data Renstra dan Dokumen Indeks ketahanan Pangan Badan Pangan Nasional tahun 2019-2021

Dari table 2.1 capaian kinerja tujuan Indeks Ketahanan Pangan mengalami tren kenaikan 2,9 poin selama periode 2019-2021. Dari trend IKP

diatas dapat dikatan bahwa Kota Bima masih masuk kedalam kelompok empat atau daerah yang maih dikatakan tahan pangan. Tabel berikut adalah cut off poin IKP. Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan.

Tabel 2.1. Cut off point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota
1	<=41,52	<=28,84
2	<= 41,52 – 51,42	<= 28,84 – 41,44
3	<= 11,42 – 59,58	<= 41,44 – 51,29
4	<= 59,58 – 67,75	<= 51,29 – 61,13
5	<= 67,75 – 75,68	<= 61,13 – 70,64
6	> 75,68	> 70,64

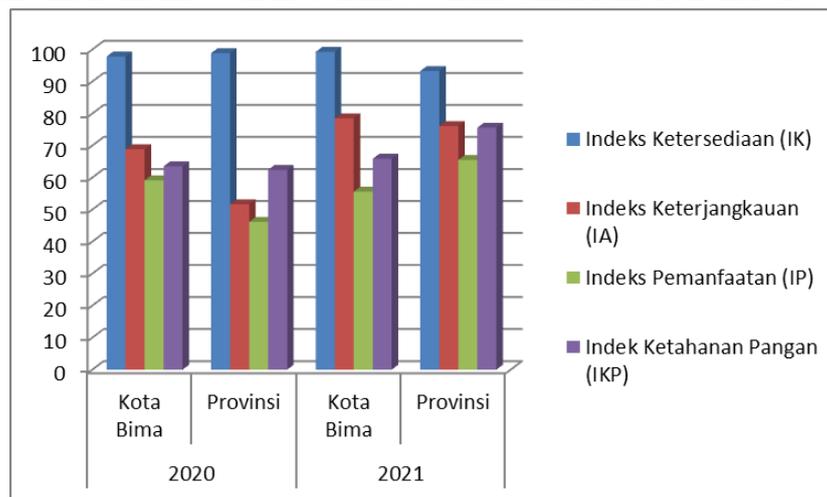
Sumber: Dokumen IKP Badan Pangan Nasional

Gambar.2.2. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2019-2022



Sumber Data: Dokumen IKP BAPANAS 2019-2021

Gambar.3.1. Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2020-2021



Nilai IKP Kota Bima 2 tahun terakhir mengalami kenaikan 2,38 poin, dan Cut Off Poin Indeks Ketahanan Pangan Kota Bima masuk dalam kelompok 5 atau pada prioritas 5. Dapat dikatakan Kota bima jika dilihat dari angka IKP nya masuk dalam kategori BAIK artinya termasuk dalam kelompok kota yang

memiliki ketahanan pangan baik tahun 2021. Berikut perbandingan nilai IKP Kota Bima dibandingkan dengan Provinsi NTB dari tahun 2020 dan 2021.

2.1.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

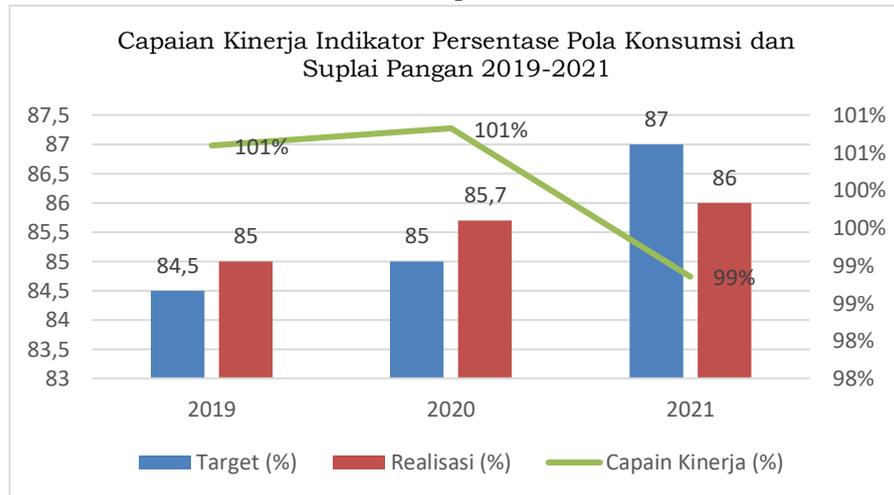
Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci pada sasaran strategis tahun 2018-2021 diuraikan di table.2.1. sebagai berikut:

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tahun 2021 atas perencanaan kinerja sebanyak 2 sasaran kinerja, seluruhnya mencapai kinerja dalam kategori “sangat berhasil” yaitu terealisasi lebih dari 100% atau 113%. Berikut gambaran capaian kinerja sasaran strategis dinas ketahanan pangan kota bima tahun 2019-2022.

Gambar 2.3. Capaian Sasaran I
Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan



Gambar 2.4. Capaian Sasaran II



Tabel. 2.2.
Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2021

Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Target (%)					Realisasi (%)					Capain Kinerja (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan	Persentase penyediaan Pangan Utama	18	20	22	24	25	21	22	34	-	-	140	110	155	-	-
	Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10		≤ 10	≤ 10	≤ 10	-	-	100	100	100	-	-
Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	84,5	0,85	87	88,3	89,6	84,5	85,7	86	-	-	98	100,5	98,9	-	-
Rata-Rata Capaian												112,7	103,5	123		

Evaluasi Pencapaian Kinerja selama 3 (tiga) Tahun Terakhir.

Kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018, 2019 dan 2020 dari table diatas menggambarkan bahwa tren selama tiga tahun terjadi kenaikan yang signifikan. Pada capaian 2 (dua) indikator sasaran 1 yaitu 100%. Untuk capaian kinerja pada sasaran 2 terjadi kenaikan namun di tahun 2019 tidak mencapai target atau hanya 98%. Dan kemudian naik atau tercapai di tahun 2021. Secara akumulasi dari capaian kinerja ke 2 (dua) sasaran tersebut sudah sangat baik atau 100%.

Evaluasi Pencapaian Kinerja dengan Target Akhir RPJMD dan Target Akhir Renstra PD.

Pada tabel 2.2. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021, untuk sasaran 1 dengan indikator Persentase penyediaan Pangan Utama tercapai 34% atau sudah melebihi capaian RPJMD dan Resntra Dinas Ketahanan Pangan. Artinya kedepan bisa dilakukan perubahan target dengan menaikkan target capaian di tahun 2023.

Capaian kinerja untuk sasaran 2 dengan Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan di tahun 2021 tercapai 98,9% dibandingkan dengan target akhir RKPD maupun Renstra PD tercapai sebesar 95,98%.

a. Persentase penyediaan Pangan Utama

Indikator persentase penyediaan pangan utama dari target 22 % terealisasi 34% dengan capaian kinerja 155%. Capaian ini diperoleh dari jumlah total ketersediaan pangan utama (beras= 24.975 Ton) di bagi dengan total jumlah kebutuhan pangan di kota Bima tahun 2021 (18.616 Ton).

Tabel 3.14. Rincian Ketersediaan Pangan di Kota Bima Tahun 2021

No	Ketersediaan Pangan	Jumlah (Ton)
1	Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima	13,5
2	Cadangan Pangan di masyarakat	21.669
3	Lumbung Pangan di masyarakat (LPM)	0,5
4	LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat)	50,7
5	Penggilingan/ pengusaha	12.188
6	Persediaan Beras Perum Bulog sub Divre Wilayah Kota Bima (GBB.Jatiwangi)	3.229
7.	Total stok Pangan/ Ketersediaan Pangan Kota Bima	24.974

Tabel.3.15. Perhitungan Suplus Devisit Beras Berdasarkan Produksi Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH (Ton)
1.	Produksi Gabah Bersih (Ton GKG)	25.301
2.	Konvesi Gabah ke Beras (64.02%) (ton Beras) (Produksi Gabah Bersih x 64.02%)	16.198
	- Jagung	23.674
	- Kacang Hijau	31
	- Kedelai	141
	- Kacang Tanah	242
	Produksi Setara Beras + Beras	40.286
5.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	155.140
6.	Kebutuhan (Jml penduduk x 120)/1000)	18.617
	SURPLUS (Produksi bersih - kebutuhan) (Ton Beras)	21.669

Perhitungan Kebutuhan Pangan di Kota Bima tahun 2021:

Kebutuhan Pangan Kota Bima = Konsumsi Per Kapita Pertahun X Σ Penduduk
 Kebutuhan Pangan Kota Bima = 120 kg X 155.140 jiwa
 = 18.616.800 Kg
 = **18.616 Ton**

Dari hasil perhitungan ketersediaan pangan di kota bima di tahun 2021 terdapat surplus sebesar 34 %. Dibandingkan tahun 2020 dengan 22 % artinya terdapat peningkatan sebesar 12 %. Dan dibandingkan dengan target Renstra terealisasi 100% . Berikut data rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan strategis tahun 2021.

Tabel.3.16. Rasio Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Strategis Tahun 2021

No	Jenis Komoditi	Kebutuhan (Ton)	Ketersediaan (Ton)	Rasio
1	2	4	3	5
1	Beras	18.016	31.629	0,57
2	Jagung	330	23.674	0,01
3	Daging Sapi	585	758	0,77
4	Daging Ayam	210	3.539	0,06
5	Telur Ayam	810	2.418	0,33
6	Minyak Goreng	1,065	1.920	0,00
7	Gula Pasir	855	1.226	0,70
8	Cabe Rawit	330	1.411	0,23
9	Cabe Keriting	90	1.919	0,05
10	Bawang Merah	540	827	0,65
11	Bawang Putih	255	484	0,53

Rasio kebutuhan pangan terhadap ketersediaan pangan, dapat menggambarkan level kerawanan/kerentanan pangan. Kategori kerawanan pangan (Bulkis,dkk,2007) seperti berikut ini:

- ≥ 1,50 = sangat rawan pangan
- 1,25 – 1,49 = rawan pangan
- 1,00 – 1,24 = agak rawan pangan
- 0,75 – 0,99 = cukup tahan pangan
- 0,50 – 0,74 = tahan pangan
- < 0,50 = sangat tahan pangan

Dari tabel rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan strategis tahun 2021 diatas menggambarkan bahwa hamper semua jenis komoditi pangan strategis dikategorikan **Tahan Pangan** atau berada angka rasio < 0,50 - 0,74. Namun pad rasio komoditi daging sapi 0,77 masuk pada kategori cukup tahan pangan.

b. Indikator Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat Konsumen (CV ≤ 10%)

Stabilitas harga dapat digambarkan dengan fluktuasi harga harga pangan ditingkat konsumen dengan nilai rata-rata (Average) harga pangan (beras) di tingkat konsumen yang dinyatakan dengan pesentase (%). Rata-rata harga pangan (beras) di tingkat konsumen dihitung dari hasil survey harga pangan harian di pasar strategis yang ada di Kota Bima. koefisien varian harga pangan (beras) menggambarkan seberapa jauh fluktuasi harga yang dipantau. Kondisi yang diharapkan adalah angka koefisien varian yang kecil karena semakin rendah angka koefisien varian berarti harga pangan (beras) yang semakin stabil.

Hasil perhitungan Koefisien Varian harga pangan (beras) tahun 2020 adalah 2,41 % atau Koefisien Varian harga pangan (beras) ≤ 10 % dapat dikatakan harga pangan (beras) stabil. Rata-rata harga pangan (beras) tahun 2020 adalah Rp.10.586,-. Tidak ada lonjakan harga yang signifikan selama tahun 2020, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan pangan utama (beras) di tahun 2020 sangat stabil.

Tabel.3.16. Perkembangan Harga Pangan Strategis Kota Bima
Triwulan I s.d. Triwulan II Tahun 2021

No	Komoditi	CV %	CV %	CV %	CV %
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Beras				
	- Premium	6,26	5,67	5,40	6,43
	- Medium	5,57	5,97	6,14	6,12
2	Jagung Pipilan Kuning	3,73	4,44	5,35	5,60
3	Kedelai Biji Kering				
4	Bawang Merah	12,87	17,25	27,70	31,65
5	Bawang Putih (bonggol)	1,16	1,91	3,90	6,43
6	Bawang putih (kating)				
7	Cabai Merah Keriting	5,92	17,36	27,27	30,53
8	Cabe Rawit Merah	26,91	29,17	32,49	35,77
9	Daging Ayam Ras	6,81	5,11	8,38	7,87
10	Telur Ayam Ras	10,55	9,01	12,71	11,85
11	Gula Pasir Lokal	5,97	5,31	5,67	5,56
12	Minyak Goreng (curah)	5,97	4,34	20,17	17,73
13	Tepung Terigu (curah)	5,97	5,31	9,16	8,56
14	Daging Sapi Murni	5,76	4,96	6,31	6,25

Analisa Coefisien Varian Harga Pangan Strategis dilakukan pada tingkat harga eceran berdasarkan harga bulanan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021. Target nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di tingkat konsumen untuk Tahun 2020 ditetapkan di bawah 10 - 30% (Untuk komoditas beras dan daging sapi maksimal 10%; untuk komoditas Hortikultura seperti jagung, kedelai, bawang merah dan cabai maksimal 30%, dan komoditas pabrikan seperti Gula Pasir dan Minyak Goreng maksimal 30%).

Tabel 3.17. Target nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di tingkat konsumen

No.	Komoditas	Batas Ambang Gejolak Harga (CV) %
1	Beras	Maksimal 10
2	Hortikultura	Maksimal 30
3	Peternakan	Maksimal 10
4	Pabrikan	Maksimal 30

Periode Triwulan I:

- Berdasarkan hasil analisis data harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen s.d Maret 2021 menunjukkan bahwa harga komoditas pangan pokok dan strategis menunjukkan nilai coefisien variasi harga masih dibawah batas maksimum yang berarti harga pangan pokok strategis hampir semuanya stabil. sesuai dengan kriteria batas maksimum yang telah ditetapkan. Untuk komoditi Cabe Rawit Merah memang mengalami fluktuasi harga yang kurang stabil dalam di akhir triwulan Pertama dikarenakan adanya kenaikan harga yang sangat drastis pada bulan Maret 2021 yang disebabkan oleh terjadinya peningkatan permintaan yang sangat signifikan yang kurang diimbangi oleh ketersediaan stoknya.

Periode Triwulan II:

- Berdasarkan hasil analisis data harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen s.d April 2021 menunjukkan bahwa harga komoditas pangan pokok dan strategis menunjukkan nilai coefisien variasi harga masih dibawah batas maksimum yang berarti harga pangan pokok strategis hampir semuanya stabil.

sesuai dengan kriteria batas maksimum yang telah ditetapkan. Untuk komoditi Cabe Rawit Merah memang mengalami fluktuasi harga yang kurang stabil dalam 3 bulan awal tahun (April - Juni) dikarenakan adanya kenaikan harga yang sangat drastis pada bulan maret, April dan Mei 2021 yang disebabkan oleh terjadinya peningkatan permintaan yang sangat signifikan yang kurang diimbangi oleh ketersediaan stoknya.

Periode Triwulan III:

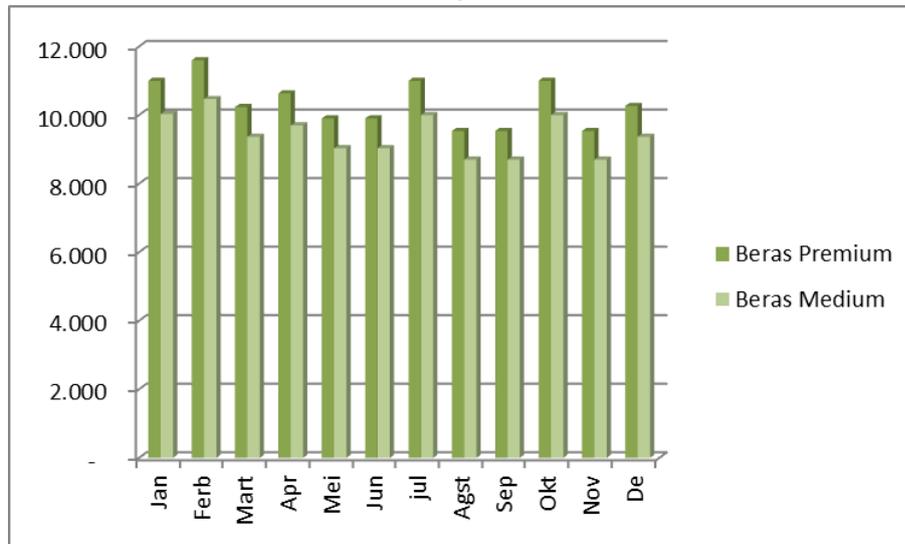
- Berdasarkan hasil analisis data harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen s.d September 2021 menunjukkan bahwa harga komoditas pangan pokok dan strategis menunjukkan nilai coefisien variasi harga masih dibawah batas maksimum yang berarti harga pangan pokok strategis hampir semuanya stabil. sesuai dengan kriteria batas maksimum yang telah ditetapkan. Untuk komoditi Cabe Rawit Merah memang mengalami fluktuasi harga yang kurang stabil dalam 3 bulan awal tahun (maret, April dan Mei) dikarenakan adanya kenaikan harga yang sangat drastis pada bulan maret, April dan Mei 2021 yang disebabkan oleh terjadinya peningkatan permintaan yang sangat signifikan yang kurang diimbangi oleh ketersediaan stoknya.

Periode Triwulan IV:

- Berdasarkan hasil analisis data harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen s.d Desember 2021 menunjukkan bahwa harga komoditas pangan pokok dan strategis menunjukkan nilai coefisien variasi harga masih dibawah batas maksimum yang berarti harga pangan pokok strategis hampir semuanya stabil. sesuai dengan kriteria batas maksimum yang telah ditetapkan. Untuk komoditi Cabe Rawit Merah memang mengalami fluktuasi harga yang kurang stabil dalam 3 bulan awal tahun (maret, April dan Mei) dikarenakan adanya kenaikan harga yang sangat drastis pada bulan maret, April dan Mei 2021 yang disebabkan oleh terjadinya peningkatan permintaan yang sangat signifikan yang kurang diimbangi oleh ketersediaan stoknya.

Stabilitas harga pangan tersebut tidak terlepas dari upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan yang secara berkesinambungan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima . Berbagai langkah strategis yang dilaksanakan meliputi: 1. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) yang merupakan kegiatan memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat (Gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok tani (Poktan), lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan) dalam melayani Toko Tani Indonesia (TTI). 2. Panel Harga Pangan yang telah berhasil mendukung terciptanya stabilitas harga pangan pokok dan strategis.

Gambar 3.2. Rata-rata Harga Beras Per Bulan Tahun 2021 di Pasar Raya Amahami



Pencapaian Kinerja Sasaran 2 diuraikan sebagai berikut:

c. Indikator kinerja Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Dari Hasil Analisis Justifikasi Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan (Konsumsi Energi Dan Protein). Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi menggambarkan konsumsi energy dan Zat Gizi yang dihasilkan dari 11 kelompok bahan makanan dengan tujuan memberikan gambaran keragaman konsumsi pangan yang dikonsumsi penduduk/ masyarakat. Skor PPH Kota Bima Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.18. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kota Bima Tahun 2021 Berdasarkan Data Sensunas 2020

No.	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Padi-padian	365,0	1.490	64,3	69,3	0,5	32,1	34,7	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	11,0	12	0,5	0,6	0,5	0,3	0,3	2,5	0,3
3.	Pangan Hewani	154,4	267	11,5	12,4	2,0	23,1	24,9	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	29,5	265	11,4	12,3	0,5	5,7	6,2	5,0	5,0
5.	Buah/ Biji Berminyak	5,1	28	1,2	1,3	0,5	0,6	0,7	1,0	0,7
6.	Kacang-kacangan	17,6	43	1,8	2,0	2,0	3,7	4,0	10,0	4,0
7.	Gula	15,2	58	2,5	2,7	0,5	1,3	1,4	2,5	1,4
8.	Sayur dan Buah	263,5	111	4,8	5,1	5,0	23,9	25,7	30,0	25,7
9.	Lain-lain	144,4	44	1,9	2,0	-	-	-	-	-
Total			2.318,4	100,0	107,8		90,6	97,7	100,0	86,0

Keterangan = Angka Kecukupan Energi : 2150 Kkal/Kapita/Hari
 Angka Kecukupan Protein 57 Gram/Kapita/Hari

Indikator kinerja Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian kinerjanya adalah 98,9 % atau dari target Renja dan Renstra 87 terealisasi 86. Berikut tabel yang menggambarkan tingkat konsumsi Energi dan Konsumsi protein pembentuk Skor PPH.

Tabel. 3.19. Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan Penduduk Kota Bima Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
		Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Gram/Kapita	%	% AKP**)
1	2	2	3	4	5	6	7
1	Padi-padian	1.490,33	64,3	69,3	34,5	64,3	60,5
2	Umbi-umbian	12,16	0,5	0,6	0,1	0,5	0,2
3	Pangan Hewani	267,30	11,5	12,4	27,6	11,5	48,4
4	Minyak dan Lemak	265,06	11,4	12,3	0,0	11,4	0,1
5	Buah/ Biji Berminyak	28,05	1,2	1,3	0,3	1,2	0,6
6	Kacang-kacangan	42,78	1,8	2,0	4,4	1,8	7,7
7	Gula	58,48	2,5	2,7	0,1	2,5	0,2
8	Sayur dan Buah	110,66	4,8	5,1	3,8	4,8	6,8
9	Lain-lain	43,55	1,9	2,0	0,9	1,9	1,6
	Total	2.318,40	100	107,8	71,8	100	125,9

Keterangan = *) Angka Kecukupan Energi 2.150 Kkal/ Kapita/Hari

***) Angka Kecukupan Protein 57 Gram/Kapita/Hari

Berdasarkan Data Sensuenas 2020

Dari tabel diatas, bahwa Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dihasilkan adalah 2.318,4 Kkal per kapita per hari, hal ini menunjukkan bahwa AKE telah melampaui angka standar AKE yang telah ditetapkan dalam analisis yaitu sebesar 2.150 Kkal per kapita per hari, sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) juga menunjukkan hasil sebesar 71,8 Gram per kapita per hari, hal ini menunjukkan AKP telah melampaui standar yang telah ditetapkan sebesar 52 Gram per kapita per hari. Hal ini berarti konsumsi pangan masyarakat Kota Bima sudah melampaui standar normative, memenuhi standar Angka Kecukupan Energi dan Angka Kecukupan Protein. Namun meskipun sudah memenuhi standar normatif kontribusi energi-energi dari 9 kelompok pangan belum memenuhi keseimbangan, artinya konsumsi masyarakat Kota Bima belum memenuhi kaidah konsumsi beragam, bergizi, seimbang dana man (B2SA). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.20. Pencapaian Energi Menurut Kelompok Pangan Penduduk Kota Bima Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/ Hari	Tingkat Konsumsi Energi			Ideal Kkal/ Kapita/ Hari
			Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Padi-padian	421,0	1.490,3	70,7	77,8	1075
2	Umbi-umbian	13,0	12,2	0,6	0,7	129
3	Pangan Hewani	137,7	267,3	10,2	11,2	258
4	Minyak dan Lemak	18,6	265,1	7,1	7,8	215
5	Buah/Biji Berminyak	2,7	28,1	0,6	0,7	64,5
6	Kacang-kacangan	12,6	42,8	1,3	1,4	107,5
7	Gula	12,4	58,5	2,0	2,2	107,5
8	Sayur dan Buah	303,4	110,7	5,4	6,0	129
9	Lain-lain	154,8	43,5	2,2	2,4	64,5
	Total		2.318,40	100,0	110,1	2.150

Keterangan = Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2150 Kkal/ Kapita/Hari

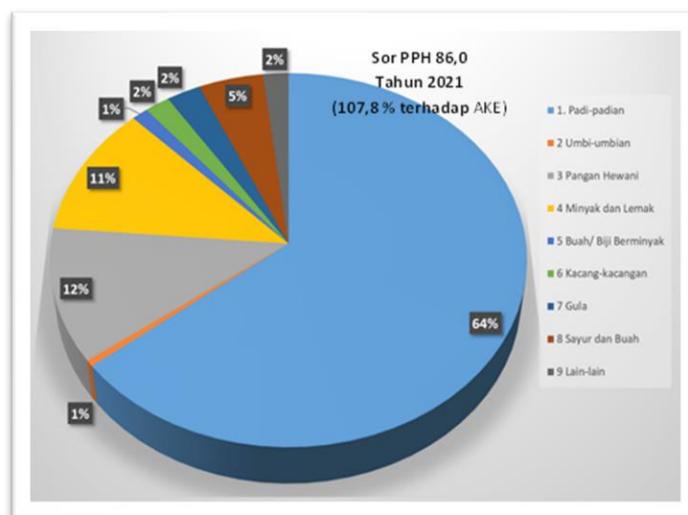
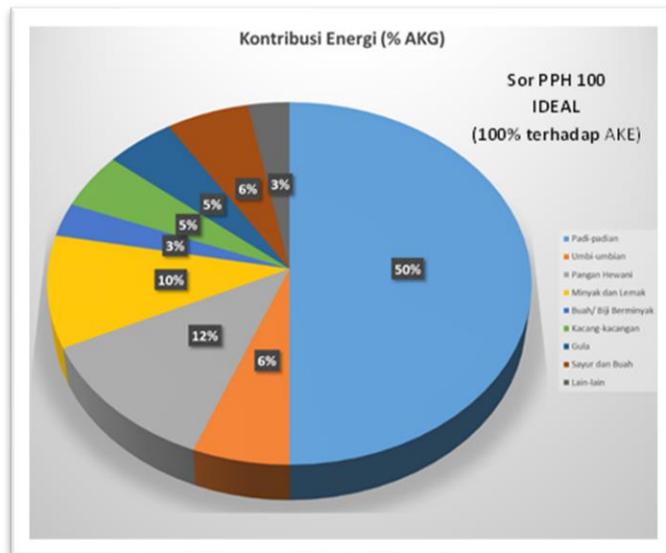
Hasil analisa terhadap pola konsumsi pangan (PPH) 2021 di Kota Bima berdasarkan Data Susenas Tahun 2020 dapat disimpulkan:

1. Angka Kecukupan Energi (AKE) tahun 2021 sebesar 2.318,4 Kkal per kapita per hari, hal ini menunjukkan bahwa AKE telah melampaui angka standar Angka Kecukupan Energi (AKE) yang telah ditetapkan dalam analisis yaitu sebesar 2.150 Kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) tahun

2021 sebesar 71,8 Gram per kapita per hari, hal ini juga menunjukkan AKP telah melampaui standar yang telah ditetapkan sebesar 57 Gram per kapita per hari..

2. Dari hasil perhitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan penduduk Kota Bima tahun 2021 sebesar 86,0. Indikator penilaian PPH ini berdasarkan pemenuhan sembilan kelompok pangan yakni padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta kelompok lain. Kita perlu dorong susunan keseimbangan pangan di Kota Bima sehingga capaian PPH meningkat menuju ke skor maksimal 100. kurangnya konsumsi umbi-umbian, kacang buah, dan sayur sehingga perlu ditingkatkan lagi.
3. Ketersediaan pangan di Kota Bima memang tergolong mencukupi namun karena PPH diukur dari keseimbangan kelompok pangan, konsumsi padi-padian dinilai sangat tinggi dibanding dengan umbi-umbian. Dan ditahun 2021 angka konsumsi padi padian terdapat penurunan dari 1.673 Kkal/kapita tahun 2020 menjadi menjadi terdapat peningkatan konsumsi umbi-umbian dari 13 gram/kapita perhari di tahun 2020 naik menjadi 1.490 Kkal/kapita di tahun 2021.

Berikut gambaran perbandingan kontribusi Skor PPH Ideal dan PPH hasil perhitungan tahun 2021.



Masih tingginya konsumsi padi-padian dan bahkan paling dominan dari 8 kelompok pangan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faaktor antara lain:

- a. Perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi;
- b. Masih rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang serta masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan;
- c. Kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu;
- d. Produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian di pasar;
- e. Keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan, berasan/butiran, dan lain-lain) belum memasuki tahap industrialisasi (scaling up production), sehingga harga pangan lokal sumber karbohidrat masih tinggi di tingkat pasaran dan masyarakat belum mampu mengaksesnya;
- a. Teknologi penyimpanan pangan lokal/ umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke masyarakat;

Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang melalui:

- a. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui Komunikasi, Informasi, Lomba Cipta Menu B2SA, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik);
- b. Upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal;
- c. Peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga

Capaian PPH Konsumsi Kota Bima Terhadap Capaian PPH Konsumsi Provinsi NTB dan Capaian PPH Konsumsi Nasional Tahun 2021:

Tabel. 3.21. Capaian Pola Pangan Harapan Konsumsi (PPH Konsumsi) Kota Bima, Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2021

Uraian	Kota Bima	Provinsi	Nasional
PPH	86	90,4	90,8

Pada tabel diatas Kualitas konsumsi penduduk Kota Bima tahun 2021 sebesar 86 masih lebih tinggi sebesar 4,4 poin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang capaian Skor PPH nya sebesar 90,4. Demikian juga dilihat dari capaian Skor PPH Nasional sebesar 90,8 yang juga lebih besar dari Skor PPH penduduk Kota Bima.

Tabel. 2.4. Analisis Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran

No.	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan	Persentase penyediaan Pangan Utama	110%	98,08	95%
		Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	100 %		
2.	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	100,47 %		
Rata-Rata			103	98,08	95

Dari tabel tersebut diketahui bahwa Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan telah mencapai kinerja 100% namun dalam analisis efisiensi capaian kinerja anggaran terhadap capaian kinerja output dikatakan *KURANG EFISIEN* atau dengan capaian kinerja efisiensi sebesar 95%.

Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh pemantapan koordinasi baik internal Dinas Ketahanan Pangan maupun dengan perangkat daerah terkait.

Tabel 2.5. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021 (Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019 - Berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2021)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun Berjalan				
					Target RKPD Tahun 2021 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
	2	3	4	5	6	7	8=(7/)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
	Urusan Wajib												
	Bidang Urusan Ketahanan Pangan												
3	2	3	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100	-	100	100		
3	2	3	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat yang terkirim selama 1 tahun	144 Orang	144	-	-	144	100%
3	2	3	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	144 Jasa/ bulan	144	-	-	144	100%
3	2	3	1	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan yang terlayani	9 unit/ bulan	9	-	-	9	100%
3	2	3	1	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	15 orang 12 bln	15	-	-	15	100%
3	2	3	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan pembersih	48 Jenis	48	-	-	48	100%
3	2	3	1	1	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja	30 Unit	30	-	-	30	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun Berjalan							
					Target RKPD Tahun 2021 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)						
		2	3	4	5	6	7	8=(7/)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)					
3	2	3	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan alat tulis kantor yang tersedia (jenis)	360	Jenis	360	-	-	-	-	360	100%
3	2	3	1	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	360	Jenis	360	-	-	-	-	360	100%
3	2	3	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor	18	unit	18	-	-	-	-	18	100%
3	2	3	1	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media (media/ bulan)	30	media/ buan	30	-	-	-	-	30	100%
3	2	3	1	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan makan minum rapat	1584	org	1584	-	-	-	-	1584	100%
3	2	3	1	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	121	kali	121	-	-	-	-	121	100%
3	2	3	1	1	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	30	kali	30	-	-	-	-	30	100%
3	2	3	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100	%	100	-	-	-	-	100	100%
3	2	3	1	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	12	kali	12	-	-	-	-	12	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan {Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun Berjalan						
					Target RKPD Tahun 2021 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
		2	3	4	5	6	7	8=(7/)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
3	2	3	1	2	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Cakupan kendaraan dinas yang layak pakai	3 Unit/bulan	3	-	-	-	-	3	100%
3	2	3	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase peningkatan sumberdaya pegawai	100 %	100	-	-	-	-	100	100%
3	2	3	1	5	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang ikut sosialisasi	40 org	40	-	-	-	-	40	100%
3	2	3	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan	100 %	100	-	-	-	-	100	100%
3	2	3	1	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan akuntabilitas dan kinerja SKPD	3 Lap	3	-	-	-	-	3	100%
3	2	3	1	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Jumlah pelaporan keuangan Semester	3 Lap	3	-	-	-	-	3	100%
3	2	3	1	6	4	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	3 Dok	3	-	-	-	-	3	100%
3	2	3	1	6	5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan SKPD (Perubahan Renstra, Renja, RKA, DPA, RKA-P dan DPA-P)	15 Dok	15	-	-	-	-	15	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun Berjalan		
					Target RKPD Tahun 2021 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		2	3	4	5	6	7	8=(7/)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	2	3	1	6	6						
3	2	3	1	7							
3	2	3	1	7	5						
3	2	3	1	7	14						
3	2	3	1	7	16						
3	2	3	1	7	33						
3	2	3	1	7	34						
3	2	3	1	7	36						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun Berjalan											
					Target RKPD Tahun 2021 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)										
											2	3	4	5	6	7	8=(7/)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	2	3	1	9		Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan	Persentase peningkatan Cadangan Pangan	25 %	25	-	-	-	-	-	25	100%				
3	2	3	1	9	1	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah Komoditi terdata Harganya	17 Komoditi	17	-	-	-	-	-	17	100%				
3	2	3	1	9	2	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Penguatan Cadangan Pangan Daerah	25 Ton	25	-	-	-	-	-	25	100%				
3	2	3	1	9	3	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah lumbung pangan desa	4 Unit	4	-	-	-	-	-	4	100%				
3	2	3	1	9	4	Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) yang terfasilitasi	12 LDPM/ GAPOKTAN	12	-	-	-	-	-	12	100%				
3	2	3	1	10		Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Angka konsumsi energi / Kkal	2.196,00 kka/ kap/ hari	2.196,00	-	-	-	-	-	2196	100%				
							Persentase bahan pangan yang lolos uji	85,70% %	0,857	-	-	-	-	-	0,857	1%				
3	2	3	1	10	1	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan	Dokumen analisis PPH	3 dok	3	-	-	-	-	-	3	100%				
3	2	3	1	10	2	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang memanfaatkan pekarangan untuk pengembangan pangan	28 klp	28	-	-	-	-	-	28	100%				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan {Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun Berjalan					
					Target RKPD Tahun 2021 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
3	2	3	1	10	3	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pemahaman tentang mutu dan keamanan pangan (kelompok)	9 klp	9	-	-	-	9	100%
3	2	3	1	10	4	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Masyarakat yang mendapat penyuluhan sumber pangan alternatif	3 kec	3	-	-	-	3	100%
3	2	3	1	10	6	Penyelenggaraan Promosi Produk Pangan Lokal	Jumlah pelaksanaan promosi	6 kali	6	-	-	-	6	100%

Tabel 2.6. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2021 (Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 - Berdasarkan Renstra 2020-2024)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan {Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun Berjalan	
					Target RKPDP Tahun 2021 (Tahun n-2)	Realisasi RKPDP Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Wajib									
	Bidang Urusan Ketahanan Pangan									
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100	100	100	100	100	100	100
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100	100	100	100	100	100	100%
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2	2	2	100	2	2	100%
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	2	2	2	100	2	2	100%
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dok	2	2	2	100	2	2	100%
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	2	2	2	100	2	2	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan {Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2021 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Lap	2	2	2	100	2	2	100%
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap	2	2	2	100	2	2	100%
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100	100	100	100	100	100	100%
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ bulan	39	39	39	100	39	39	100%
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	112 Dok	112	112	112	100	112	112	100%
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1	1	1	100	1	1	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan {Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2021 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Lap	4	4	4	100	4	4	100%
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100	100	100	100	100	100	100%
2.09.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	1	1	1	100	1	1	100%
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	100	100	100	100	100	100	100%
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1	1	1	100	1	1	100%
2.09.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30	30	30	100	30	30	100%
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100	100	100	100	100	100	100%
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	3	3	3	100	3	3	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan {Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2021 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1	1	1	100	1	1	100%
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1	1	1	100	1	1	100%
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1	1	1	100	1	1	100%
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Lap	10	10	10	100	10	10	100%
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100	100	100	100	100	100	100%
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12	12	12	100	12	12	100%
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12	12	12	100	12	12	100%
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	1	1	1	100	1	1	100%
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	3	3	3	100	3	3	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan {Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2021 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1	1	1	100	1	1	100%
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11	11	11	100	11	11	100%
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8	8	8	100	8	8	100%
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1	1	1	100	1	1	100%
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka ketersediaan energi	2.692 kka/ kap/ hari	2692	2632	2684	102	2662	3198,97	119%
		Angka ketersediaan protein	67,68 gram/ kap/ hari	66,68	66,68	74,17	111	67,18	75,74	112%
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan pokok terhadap kebutuhan daerah	20 %	20	%	24	34	-	20	100%
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Lap	1	1	1	100	1	1	100%
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Lap	1	1	1	100	1	1	100%
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 klp	12	12	12	100	12	12	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan {Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun Berjalan	
					Target RKPD Tahun 2021 (Tahun n-2)	Realisasi RKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.03.2.01.06	Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	1	1	1	100	1	1	100%
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap total kebutuhan daerah	20 Ton	20	20	13,59	0,159882353	17	11	55%
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2 Lap		2	2	100	2	2	100%
2.09.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dok		1	1	100	1	2	200%
2.09.03.2.02.01	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Ton		15	13,59	90,6	17	11	55%
2.09.03.2.02.02	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	20 Ton		15	13,59	90,63	17	11	55%
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah konsumsi energi	2.269 kka/ kap/ hari		2,161,5	2.318,40	107,25	2,161,5	2.288,00	101%
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dok		1	1	100	1	1	100%
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Lap		1	1	100	1	1	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2019-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target program dan kegiatan {Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun Berjalan	
					Target RKPd Tahun 2021 (Tahun n-2)	Realisasi RKPd Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8=(7/)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	20 %		25	33	8000%	20	92	460%
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	10 Kel		10	8	80	20	92	460%
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	2 Lap		2	2	100	2	2	100%
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase bahan pangan yang aman konsumsi	85 %		85	90	106%	85	100	118%
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jenis pangan segar yang diawasi	80 %		80	80	100	80	80	100%
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok		1	1	100	1	1	100%
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok		1	1	100	1	1	100%
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok		1	1	100	1	1	100%

Tabel.2.7.
Realisasi Program Keiatan Tahun 2021 yang tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil Evaluasi yang di Rencanakan

Kode	Urusan/ Proram/ Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi	Kebijakan/ Tindakan
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel.2.8.
Realisasi Program Keiatan Tahun 2021 yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil Evaluasi yang di Rencanakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI	KET.
1	2	3	4	5
	Urusan Wajib			
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Target Tercapai	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Target Tercapai	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Target Tercapai	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Target Tercapai	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Konsistensi perencanaan dan penganggaran	Target Tercapai	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsistensi perencanaan dan penganggaran serta koordinasi dengan stakeholder terkait	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	
2.09.03.2.01.01	Angka ketersediaan energi	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	
2.09.03.2.01.02	Angka ketersediaan protein	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Konsistensi perencanaan dan penganggaran serta koordinasi dengan stakeholder terkait	Fluktuasi harga pangan dapat diminimalkan	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Kesadaran produsen dan pedagang pangan segar asal tumbuhan terhadap keamanan pangan semakin baik	Meningkatnya keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat	

Tabel.2.9.
Realisasi Program Keiatan Tahun 2021 yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil Evaluasi yang di Rencanakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI	KET.
	2			
	Urusan Wajib			
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsistensi perencanaan dan penganggaran serta koordinasi dengan stakeholder terkait	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Konsistensi perencanaan dan penganggaran serta koordinasi dengan stakeholder terkait dan Penanganan jumlah desa yang masuk kategori rawan pangan.	Berkurangnya daerah rawan pangan	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kesadaran produsen dan pedagang pangan segar asal tumbuhan terhadap keamanan pangan semakin baik	Meningkatnya keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat	

Tabel.2.10.
Realisasi Program Keiatan Tahun 2021 yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil Evaluasi yang di Rencanakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ Kegiatan	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI	KET.
1	2	3	4	5
	Urusan Wajib			
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Kurang Konsistensinya perencanaan dan penganggaran	Target tidak Tercapai	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kurang Konsistensinya perencanaan dan penganggaran	Target tidak Tercapai	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima adalah salah satu SKPD Pelaksana Wajib Urusan Ketahanan Pangan di Kota Bima. Strategi pembanguna dilaksanakan melalui peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi, dan keamanan pangan yang didasarkan 4 (empat) jenis pelayanan dasar bidang ketahanan pangan menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan, berdasarkan PERMENTAN No. 65 / Permentan/ OT.140/ 12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:

- Pelayanan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan,
- Distribusi dan akses pangan,
- Penganekaragaman dan keamanan pangan, serta
- Penanganan kerawanan pangan.

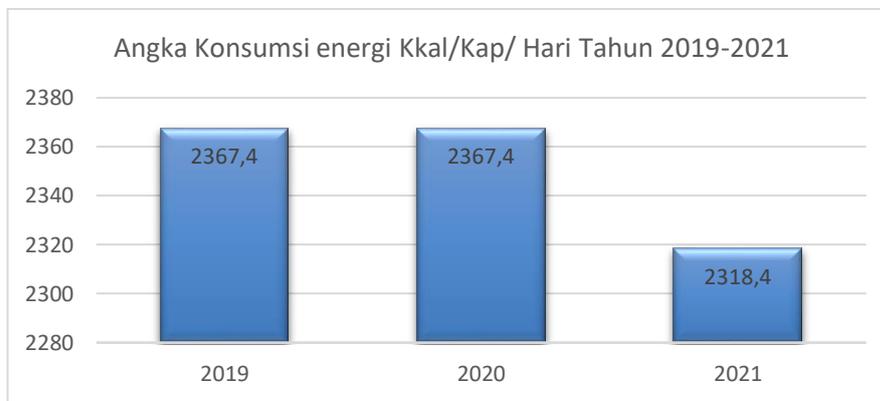
Ketersediaan energi dihitung dari ketersediaan pangan untu dikonsumsi yang berasal dari produksi, stok et impr, kemudan dikuangi penggunaan pakan, bibit, industri dan tercecer. Ketersediaan energi berfluktuasi setiap tahunnya. Fluaktuasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Meskipun tidak mencapai target 100%, AKE telah melampaui angka standar AKE yang telah ditetapkan dalam analisis yaitu sebesar 2.150 Kkal per kapita per hari. Berikut gambaran perkembangan Konsumsi Energi kkal/kap/hari tahun 2019-2021.

Gambar 2.5. Angka Ketersediaan Energi Kkal/Kap/Hari



Gambar 2.6. Angka Konsumsi Energi Kkal/Kap/ Hari Tahun 2019-2021



Sumber Data: Skor Pola Pangan Harapan Kota Bima, Data Susenas

Angka konsumsi energi adalah angka yang menunjuka jumlah energi yang dikonsumsi oleh penduduk yang berasal dari bahan makanan yang dikonsumsi. Angka konsumsi energi yang dianjurkan adalah 2.250 Kkal/kapita/hari. Ini merupakan angka rata-rata, kebutuhan energi untuk setiap individu sangat bervariasi antara lain oleh jenis kelamin, usia, aktifitas fisik, dan kondisi kesehatan seseorang. Jika konsumsi energi berlebih dari anjuran dapat menyebabkan berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes, kanker, atau serangan jantung. Dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Permenes RI No 75 Tahun 2013, masing-masing adalah 2.150 kkal.

Angka konsumsi energi di Kota Bima cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan energi dan protein semakin baik. Antara lain melalui menerapkan pola pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman dengan memanfaatkan potensi pangan lokal.

2.2.1. Capaian Kinerja

Cakupan kinerja dalam hal ketersediaan pangan yaitu tercapainya minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.65/Permentan/OT.140/12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 2.200 kkal/hari bagi setiap swasembada pangan khususnya beras dan jagung, hal ini ditunjang oleh program nasional adanya upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (Pajale) energi per kapita mencerminkan jumlah energi dalam satuan kkal yang tersedia setiap hari bagi setiap penduduk di Kota Bima.

Pencapaian target kinerja ini merupakan sinergi atas berbagai program pembangunan bidang ketahanan pangan, utamanya di sektor produksi pertanian dalam arti luas yang dilaksanakan oleh SKPD-teknis terkait. Upaya-upaya intensifikasi, ekstensifikasi, serta mekanisasi pertanian menjadi pendorong utama peningkatan produksi pangan, yang memacu jumlah produksi pertanian tanaman pangan sebagai sumber pangan pokok (sumber karbohidrat) utama masyarakat Kota Bima.

Faktor pengendalian pertumbuhan penduduk juga turut menjadi kunci tingkat ketersediaan energi maupun protein, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan jumlah konsumsi pangan, sedangkan secara umum, tingkat pertumbuhan penduduk dengan peningkatan produksi pangan percepatannya tidak sebanding.

Pelayanan perangkat daerah dapat diukur berdasarkan target dan indikator utama yang dapat dilihat pada table T-C. 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

Tabel 2.7.

(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona I	IKK	Target					Realisasi Kinerja			Proyeksi	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase penyediaan Pangan Utama		Persentase penyediaan Pangan Utama	18	20	22	24	25	10	22	34	24,00	25,00
2.	Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	CV ≤ 10%	Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
3.	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	100	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	84,5	0,85	87	88,3	89,6	85	86	86	88,3	89,6

Dari hasil evaluasi atau capaian kinerja 2 sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan telah diuraikan pada sub bab sebelumnya.

Uraian keberhasilan, kendala capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun tahun 2021 adalah:

Dari empat program yang dilaksanakan seluruhnya tercapai 100%. Terhadap indikator kinerja yang masih belum maksimal dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel diatas. Adapun faktor-faktor penyebab belum optimalnya kinerja kegiatan Dinas Ketahanan Pangan adalah:

- a. Dari dalam (Internal) : terbatasnya personil, kemampuan SDM yang tidak merata dan minimnya sarana prasarana yang ada. Belum terpenuhinya Anggaran penunjang peningkatan distribusi dan cadangan pangan serta belum updatenya Peta Rawan Rentan Pangan sebagai acuan perencanaan pengentasan daerah rawan/rentan pangan di Kota Bima.
- b. Dari Luar (eksternal) : Kegiatan kurang diminati atau kesadaran masyarakat masih kurang terhadap pentingnya suatu usaha, kesempatan dan informasi pelatihan kurang terbuka serta kurang menyesuaikan keinginan pelatihan masyarakat di bidang usaha pertanian ataupun peternakan. Dan faktor wabah Pandemi Covid-19.

Untuk menunjang keberhasilan suatu perencanaan diperlukan upaya-upaya dalam peningkatan kinerja dan komitmen semua pihak terkait dalam pelaksanaannya, sehingga dalam proses tersebut terlihat keterlibatan seluruh komponen atau unsur dalam sistem tersebut, yakni :

- a. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas SDM melalui kerjasama berupa bimbingan teknis maupun pelatihan kantor sendiri untuk meningkatkan kompetensi dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- b. Merumuskan Rasio kebutuhan SDM melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai kompetensi dan impleentasi pemenuhan kebutuhan SDM oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia.
- c. Saling memberikan informasi yang memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan maupun dalam setiap penyelesaian tugas.
- d. Memberikan sosialisasi baik kepada personel Dinas maupun kepada masyarakat tentang ketahanan pangan.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- f. Melaksananakan perencanaan yang sebaik-baiknya dan Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja SDM lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2018-2023 menunjukkan aspek: kerusakan lingkungan, perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, akses petani terhadap permodalan, kelembagaan petani dan penyuluh serta keterpaduan antar sektor. untuk memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), dengan meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats) terhadap pembangunan pertanian ketahanan pangan. Selanjutnya dengan mempertimbangkan faktor lingkungan internal kekuatan dan kelemahan dan serta lingkungan eksternal peluang dan ancaman yang dihadapi serta membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan strategik sebagai strategi pembangunan.

Tabel 2.8.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya profesionalisme dan kompetensi PNS.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase PNS berpendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan - Jumlah PNS bersertifikasi teknis masih sedikit Kesesuaian pendidikan dan jabatan masih perlu ditingkatkan 	Kurangnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2.	Belum optimalnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Belum optimalnya ketersediaan energi dan protein	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya data ketersediaan pangan 2. Keterbatasan sumber daya pangan 3. Masih adanya daerah rawan pangan
		Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga pangan strategis yang fluktuatif. 2. Panjangnya rantai pasok dan jaringan distribusi pangan 3. Rendahnya akses pangan pada kondisi tertentu
		Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman di tingkat rumah tangga. 2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. 3. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal di Kota Bima
		Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar. 2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran produsen tentang keamanan pangan 3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan segar yang aman.
		Perlunya jaminan mutu pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengujian pangan segar yang beredar 2. Belum semua pangan segar asal tumbuhan yang beredar memenuhi persyaratan jaminan mutu

2.3.1. Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan diatas dapat ditentukan isu strategis dalam upaya peningkatan ketahanan pangan Kota Bima tahun 2023. Diman pada dasarnya perencanaan tidak dapat dilepaskan dari isu strategis baik itu yang bersifat lokal, regional, nasional, dan internasional. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang di masa mendatang. Identifikasi isu strategis ketahanan pangan akan memberikan panduan dalam penyusunan perencanaan yang tanggap terhadap perubahan atau dinamika lokal, regional, nasional, dan internasional. Hasil identifikasi isu strategis bidang Ketahanan Pangan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini meliputi:

1. Neraca Bahan Makan Makann dan nilai PPH Ketersediaan belum memenuhi standar yang diarpakan;
2. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat (Niai PPH Konsumsi) masih belum sesuai hirarki yang di tetapkan Beragam Bergizi dan Seimbang (B2SA).
3. Masih ditemukannya bahan pangan yang belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, disebabkan karena sebagian besar bahan pangan yang beredar di Kota Bima berasal dari luar Kota Bima dan masih ada pengusaha yang belum menerapkan satandar mutu dan keamaann pangaan yang dipersyaratkan
4. Optimalisasi pemaparan dan akses pelaku usaha pangan lokal terhadap modal.

Pembinaan keamanan pangan dilaksanakan antara lain baru dalam taraf pemberian materi keamanan pangan dalam latihan pengolahan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, sementara pengawasan yang dilaksanakan dengan monitoring bersama oleh dinas/instansi terkait terhadap pangan yang beredar di masyarakat belum optimal.

Beberapa hambatan mewujudkan ketahanan pangan baik itu ketersediaan, distribusi, diversifikasi dan keamanan pangan di pengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk pertahunnya yang mengakibatkan kebutuhan akan meningkat, di beberapa sentra sentra produksi tanaman pangan ada kecenderungan alih fungsi lahan yang produktif. Hasil tersebut menunjukkan masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya keamanan pangan yang kita konsumsi. Tingkat pengetahuan yang kurang akan akibat penggunaan bahan tambahan makanan berbahaya, atau faktor ekonomi untuk menekan biaya produksi dan meraih keuntungan sebesar-besarnya menjadi tantangan yang dihadapi dalam pembinaan keamanan pangan di Kota Bima.

Adapun isu-isu strategis yang menyangkut tugas pokok dan fungsi adalah :

1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sistem
 - a. Laju peningkatan produksi pangan cenderung menurun
 - b. Ketergantungan impor/pasokan dari luar masih sangat besar demikian juga dengan daging.
 - c. Belum optimalnya pengelolaan sistem cadangan pangan daerah.
 - d. Belum optimalnya penggunaan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan desa sebagai sumber cadangan pangan masyarakat.
 - e. Belum optimalnya pengelolaan keberadaan lumbung pangan masyarakat.

- f. Belum berkembangnya kelembagaan pangan yang mendukung peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengantisipasi masalah kekurangan pangan di daerah rawan pangan.
 - g. Masih adanya beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan.
 - h. Masih adanya penduduk miskin yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan, akibat dari rendahnya ketrampilan, akses permodalan dan lapangan kerja.
2. Distribusi dan Akses Pangan
- a. Pemasaran bahan pangan masih dikuasai oleh pelaku dagang
 - b. Belum adanya kelembagaan formal yang dibentuk dan dikuasai petani/produsen untuk dapat menguasai harga
 - c. Masih rendahnya harga saat panen raya
 - d. Masih panjangnya rantai pemasaran pangan sehingga menyebabkan peningkatan nilai tambah terhadap produk pangan.
 - e. Masih terjadi gejolak harga bahan pangan terutama menjelang/menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional.
 - f. Masih adanya tekanan dan gencarnya pasokan produk-produk pangan impor dengan kualitas dan harga yang lebih murah.
3. Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan
- a. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras
 - b. Belum optimalnya usaha perubahan perilaku masyarakat terhadap diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini.
 - c. Belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal.
 - d. Masih rendahnya citra pangan lokal di masyarakat.
 - e. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen terhadap keamanan pangan segar maupun olahan.
 - f. Belum efektifnya pengawasan keamanan pangan.

Disamping isu-isu strategis tersebut terdapat beberapa tantangan dan peluang yang mempengaruhi dalam peningkatan pelayanan SKPD sebagai berikut :

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan/ peningkatan pelayanan SKPD Badan Ketahanan Pangan di Kota Bima, antara lain:

1. Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia di Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.
2. Pertambahan jumlah penduduk
3. Semakin terbatasnya daya dukung sumber daya alam
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana usaha di bidang pangan
5. Semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor
6. Belum meratanya pengendalian harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya.
7. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi Pangan.
8. Skor pola pangan harapan belum maksimal, sehingga pola konsumsi masyarakat belum ideal;
9. Perilaku masyarakat yang masih bersandarkan pada paradigma “belum makan kalau belum makan nasi” sehingga cenderung sulit untuk merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal dari sumber pangan lokal), dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.

10. Adanya kecenderungan masyarakat mengkonsumsi makanan cepat saji dari bahan impor.
11. Kemampuan produksi dan pelaku usaha pangan di dalam menjamin mutu dan keamanan pangan segar dan olahan yg dihasilkan belum optimal.

b. Peluang

Peluang yang dimiliki pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang antara lain :

1. Adanya kebijakan pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib.
2. Tersedianya teknologi budidaya informasi dan komunikasi
3. Adanya kebijakan Nasional Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
4. Adanya pekarangan masyarakat yang tersedia untuk dilaksanakan penanaman pangan lokal yang berkualitas serta dapat sebagai sumber pangan keluarga dan meningkatkan pendapatan.
5. Adanya harga pembelian pemerintah yang dilaksanakan Bulog, LDPM dan kelompok lumbung masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara umum tidak terdapat banyak perbedaan antara Rancangan Awal RKPD dengan Renja PD tahun 2023. Dalam Rancangan Awal RKPD, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima mengusulkan anggaran sebesar Rp. 3.763.370.932,- yang direncanakan dipergunakan untuk keperluan belanja gaji, belanja rutin maupun kegiatan untuk mencapai sasaran strategis tahun 2023.

Dari total rancangan anggaran tersebut, sebesar Rp.72% untuk penunjang kegiatan dan belanja gaji, tunjangan ASN. Untuk keperluan kegiatan inti dalam mencapai target kinerja PD. Dengan Besar anggaran 28%, rencana capaian kegiatan Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima berikut:

Tabel 2.9.
(Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6			7			8
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						-				
	Dinas Ketahanan Pangan				3.763.370					4.515.993	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Bima	Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.721.732	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Bima	Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.365.403	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	13.298	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	13.298	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2.204	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2.204	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	561	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	561	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	561	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	561	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	341	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	341	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	541	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	541	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	9.090	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	9.090	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2.383.739	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2.383.739	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	2.258.197	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang	2.258.197	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/	Kota Bima, Mpunda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	100%	122.400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/	Kota Bima, Mpunda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	100%	122.400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Verifikasi Keuangan SKPD	a, Penatoi	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Verifikasi Keuangan SKPD	a, Penatoi	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan / Dokumen	2.285	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan / Dokumen	2.285	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Semester	857	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Semester	857	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	550	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	182.633	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	550	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	550	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	4.992	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	182.633	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 PNS	4.992	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 PNS	4.992	2 kali sosialisasi peraturan pelaksanaan administrasi urusan pemerintah daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bima	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	182.633	#REF!	Kota Bima	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	182.633	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	1.749	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Jenis	1.749	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	26.789	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	26.789	Pengadaan 4 unit PC & 4 Unit PC Lap Top
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 orang/kali	4.735	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bima	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 orang/kali	4.735	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bima, Mpund a, Penatoi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Jenis	23.328	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bima	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Jenis	23.328	
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima, Mpund a, Penatoi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 kali	126.121	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 kali	126.121	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	104.444	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	104.444	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima, Mpund a, Penatoi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 surat	72.395	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 surat	72.395	Gj. Honorer 4 orang
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima, Mpund a, Penatoi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Jasa/ bulan	29.089	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Jasa/ bulan	29.089	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima, Mpund a, Penatoi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Jenis	2.960	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bima	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Jenis	2.960	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	32.023	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bima	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	316.023	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	8.423	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	8.423	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	2.850	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bima	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	2.850	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Jenis	4.750	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bima	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Jenis	4.750	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7			8	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Persen	16.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	50 Persen	300.000	Rehab gedung kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pembanguna n Pagar Kantor
2.09.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kota Bima	Jumlah ketersediaan energi Jumlah	2.692	872.920	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bima	Jumlah ketersediaan energi Jumlah	2.692	872.920	
			Jumlah ketersediaan protein	67,68				Jumlah ketersediaan protein	67,68		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Bima	Persentase ketersediaan pangan pokok terhadap kebutuhan daerah	20 Persen	150.965	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Bima	Persentase ketersediaan pangan pokok terhadap kebutuhan daerah	20 Persen	150.965	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Bima	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	50.476	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Bima	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	50.476	Data dan informasi ketersediaan pangan daerah, NBMI (NBM, Prognosa,

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6			7			8
											PPH Ketersediaan) & Gj Honorer
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Bima	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	16.034	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Bima	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	16.034	Bantuan alat pengolahan pangan lokal
	Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Kota Bima	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	4 Dokumen	51.556	Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Kota Bima	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	4 Dokumen	51.556	Informasi mingguan harga pangan strategis daerah
	Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Bima	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	4 Unit	32.899	Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Bima	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	4 Unit	50.000	Mendukung kegiatan PUPM dalam rangka stabilitas harga dan pasokan pangan bantuan Operasional, Bantuan pengisian, dan modal usaha. 2 Unit lantai jemur
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Kota Bima	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap total kebutuhan daerah	20 Ton	206.013	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Kota Bima	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap total kebutuhan daerah	20 Ton	326.673	SPM Permentan no. 11 mengamanatkan 80 ton beras

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Kota Bima	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	33.931	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Kota Bima	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	33.931	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kota Bima	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 dokumen	17.742	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kota Bima	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 dokumen	17.742	
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Bima	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Ton	129.360	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Bima	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Ton	250.000	
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Bima	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Ton	24.980	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kota Bima	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Ton	25.000	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kota Bima	Jumlah konsumsi energ	2.269 kka/ kap/ hari	515.942	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kota Bima	Jumlah konsumsi energ	2.269 kka/ kap/ hari	515.942	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kota Bima	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen	88.973	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kota Bima	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen	88.973	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Bima	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	41 Kelurahan	426.969	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Bima	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	41 Kelurahan	426.969	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kota Bima		20%	80.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kota Bima		20%	150.000	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Bima		10 kelurahan	80.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Bima		10 kelurahan	150.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2 Keg	80.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Bima	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2 Keg	150.000	Koordinasi dan pembuatan Peta FSVA (Peta Kerawanan/ Kerentanan Pangan). Bantuan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6			7			8
											kepada Klpk masy
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kota Bima		85%	88.714	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kota Bima		85%	127.670	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bima		80%	88.714	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bima		80%	127.670	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bima	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota yang Dibina	25 petani/ pelaku usaha	40.800	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bima	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota yang Dibina	25 petani/ pelaku usaha	40.800	Gj Honorer
	Registrasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bima	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	25 petani/ pelaku usaha	36.870	Registrasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bima	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	25 petani/ pelaku usaha	36.870	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikati f (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	Kota Bima	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Unit	11.044	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	Kota Bima	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Unit	50.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mekanisme penerimaan usulan program/kegiatan dari masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang dan penerimaan proposal yang langsung ditujukan ke SKPD.

Namun secara kuantitas, proporsi usulan yang masuk lebih banyak melalui pengajuan proposal ke SKPD, dibandingkan pada saat forum musrenbang.

Dari Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat / pemangku kepentingan yang diperoleh dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bima serta hasil desk Musrenbang Kota bersama Bappeda dan Litbang Kota Bima serta Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima maupun Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, adalah sebagai berikut (terlampir T-C.32). Usulan hibah di sesuaikan dengan target yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2018-2023 dan rencana kerja dinas ketahanan pangan tahun 2023.

Tabel .2.12.
(Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
01.00	Dinas Ketahanan Pangan				
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Angka ketersediaan energi	2.692,0	
			Angka ketersediaan protein	67,68	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Persentase ketersediaan pangan pokok terhadap kebutuhan daerah	20%	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	Bantuan alat pengolahan pangan lokal
2.09.03.2.01.06	Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 Unit	Mendukung kegiatan PUPM dalam rangka stabilitas harga dan pasokan pangan bantuan Operasional, Bantuan pengisian, dan modal usaha.
		Kel. Rontu dan Kel. Nungga		2 Unit	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat 2 Unit @ 150 jt x 2 unit

B A B 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Visi Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya pada peningkatan produktifitas yang tinggi, tetapi juga apakah peningkatan produksi pangan tersebut sudah dapat memperbaiki gizi masyarakatnya. Oleh karena itu perencanaan ketahanan pangan harus bersifat holistik, realistik, kontinyu dan aktual. Konsekuensinya dalam pembuatan perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang harus diperlihatkan, tetapi juga mengenai bagaimana caranya merumuskan pilar ketersediaan dan kerentanan pangan, pilar distribusi pangan dan pilar pola konsumsi dan keamanan pangan dapat berproses dan berjalan secara sinergis.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”, yang akan diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi. Misi tersebut dikenal sebagai nawacita kedua yang merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan nawacita pertama. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

3.1.2. Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan visi jangka menengah tahun 2020-2024 yakni: “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melalui *misi Kementerian Pertanian yaitu:*

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) mendukung misi Kementerian Pertanian yaitu “*Mewujudkan Ketahanan Pangan*”.

Sumber Data Renstra Badan Ketahanan Pangan Pusat Tahun 2020-2024

3.1.3. Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Visi dan Misi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahunn 2018-2023 yang menjadi Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023-2023, adalah:

Visi : NTB GEMILANG

Misi :

1. NTB Tangguh dan Mantap
2. NTB Bersih dan Melayani
3. NTB Sehat dan Cerdas
4. NTB Asri dan Lestari
5. NTB Sejahtera dan Mandiri
6. NTB Aman dan Berkah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima secara fungsional memiliki fungsi dan peranan sebagai lembaga yang tidak hanya menjabarkan kebijakan daerah, akan tetapi harus menjabarkan pula kebijakan pembangunan yang telah digariskan secara nasional. Dalam kaitan tersebut, maka Dinas Ketahanan Kota Bima telah menetapkan tujuan dan sasaran Renja SKPD berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Tujuan Renja SKPD : Meningkatkan ketahanan pangan

Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat.
2. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam

Kebijakan Umum : 1. Meningkatkan ketersediaan
2. Keterjangkauan (Akses)
3. Pemanfaatan/ Konsumsi

Arah Kebijakan : 1. Peningkatan ketersediaan pangan utama; dengan meningkatkan ketersediaan energi dan protein dengan pangan tersedia cukup untuk seluruh penduduk (volume, keragaman, mutu, aman dikonsumsi).
2. Menjaga stabilitas harga pangan ditingkat konsumen; dengan meningkatkan distribusi dan akses pangan bagi masyarakat, dengan pasokan pangan merata, dan terjangkau secara berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang aman Beragam, Bergizi dan Seimbang; dengan meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, dengan rumah tangga mampu

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

mengakses cukup pangan dan mengelola konsumsi sesuai kaidah gizi dan kesehatan.

Secara sistematis dapat diuraikan pada tabel 3.3 berikut. Dan pada tabel 3.4 menjabarkan sasaran, program, indikator sasaran, indikator program, dan formula/penjelasan perhitungan indikator.

Tabel.3.4.
Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023

Uraian	Indikator Tujuan/ Sasaran	Arah Kebijakan	Target Tahun 2023
Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung Misi ke-5 (Lima) Misi RPJMD Provinsi NTB: NTB Sejahtera dan Mandiri			
Tujuan: Terwujudnya Ketersediaan Pangan yang Beragam	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Mendorong Keragaman Pola Konsumsi dan Meningkatkan Kewaspadaan Pangan	95,83
Sasaran:			
1. Meningkatnya Ketersediaan Komoditas Pangan Strategis;	Rasio Ketersediaan terhadap kebutuhan pangan (Persen)		100
2. Meningkatnya Stabilitas Harga Komoditas Pangan Pokok Strategis;	Capaian Coefisien Variasi (CV) Komoditas Pangan Pokok Strategis (Persen)		Lebih Kecil dari 10 (<10)
3. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).	Tingkat Konsumsi Protein (gr/kap/hari)		70,73

Tabel 3.5.
Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2022

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Mendukung Visi dan Misi RPJMD Tahun 2018-2023				
Visi RPJMD Tahun 2018-2023 Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat Yang Maju dan Mandiri				
Misi 1 Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penjelasan
Meningkatnya ketahanan pangan	1. Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama, distribusi, dan keamanan pangan serta diversifikasi bahan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan utama	Meningkatkan ketersediaan energi dan protein dengan pangan tersedia cukup untuk seluruh penduduk (volume, keragaman, mutu, aman dikonsumsi).
			Menjaga stabilitas harga pangan ditingkat konsumen	Meningkatkan distribusi dan akses pangan bagi masyarakat, dengan pasokan pangan merata, dan terjangkau secara berkelanjutan.
	2. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam	Meningkatkan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam	Peningkatan Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang aman Beragam	Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, dengan rumah tangga mampu mengakses cukup pangan dan mengelola konsumsi sesuai kaidah gizi dan kesehatan.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Mendukung Visi dan Misi RPJMD Tahun 2018-2023				
Visi RPJMD Tahun 2018-2023 Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan Setara Menuju Masyarakat Yang Maju dan Mandiri				
Misi 1 Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Penjelasan
			Bergizi dan Seimbang	

Sumber: Hasil analisis dan Casecading

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan berdasarkan prioritas pembangunan yang tercantum pada RKPD Tahun 2021, dinas Ketahanan Pangan Kota Bima mendukung Prioritas Pembangunan Daerah pada aspek Pembangunan Kesehatan.

Tema RKPD Kota Bima Tahun 2021 adalah “Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar, Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat dan Pemulihan Sosial Ekonomi serta Peningkatan Infrastruktur Terintegrasi”. Untuk mencapai tema yang dimaksud selanjutnya ditetapkan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bima.

Tabel berikut menggambarkan secara sistematis prioritas pembangunan daerah menurut sasaran pada tujuan pembangunan.

Tabel 3.6.
Prioritas dan Sasaran

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator sasaran daerah (outcome)	Sasaran PD	Indikator sasaran PD (outcome)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%) Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Tabel 3.7.
Tujuan dan Sasaran PD

No	Tujuan dan Sasaran PD	Indikator tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tujuan:		
1,1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	63,65
2	Sasaran:		
2.1	Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	25 <10
2.2	Meningkatnya pola konsumsi pangan	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	89,6

No	Tujuan dan Sasaran PD	Indikator tujuan dan Sasaran PD	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran 2023
1	2	3	4
	masyarakat yang beragaman		

Tabel. 3.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2023

No	IKU	Indikator IKU	Target Kinerja IKU
A.	Sasaran:		
1.	Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	25 <10
2.	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragaman	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	89,6
B.	Program:		
1.	Meningkatnya diversifikasi pangan masyarakat	Angka ketersediaan energi Angka ketersediaan protein	2.692 67,68
2.	Meningkatnya Penanganan Kerawanan pangan	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	20
3.	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase bahan pangan yang aman konsumsi	90

Tabel 3.8.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dan Formulai Perhitungan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KIERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1 2019	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bima yang Merupakan Tanggung Jawab Dinas Ketahanan Pangan								
1.	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Daerah	63,00	63,50	63,58	63,60	63,65
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan								
2.	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	18	20	22	24	25
			Rumus Target:	$\frac{\sum \text{Ketersediaan Pangan Utama}}{\sum \text{Kebutuhan pangan}} \times 100$				
			∑ Ketersediaan Pangan Utama:	∑ Jumlah total ketersediaan pangan utama yang diproduksi setara beras, pangan utama yang ada di LPM, Gudang CPP dan bagian dari Kota Bima yang ada di Bulog				
			∑ Kebutuhan pangan:	adalah 80% dari total cadangan beras provinsi dikalikan dengan jumlah penduduk kab/kota dibagi jumlah penduduk Provinsi				
				$= 80\% \times \text{CBP Provinsi} \times \frac{\sum \text{Penduduk Kota}}{\sum \text{Penduduk Provinsi}} \times 100\%$				
			Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	<10	<10	<10	<10	<10
			Rumus Target:	$\text{CV} = \frac{\text{Std. Deviasi Harga Pangan}}{\text{Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan}} \times 100$				

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KIERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1 2019	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Std. Deviasi Harga Pangan:	Statistik yang mengukur penyebaran kumpulan harga pangan terhadap rata-rata dan dihitung sebagai akar kuadrat dari varians.				
			Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan:	nilai rata-rata (Average) harga pangan (beras) di tingkat konsumen dihitung dari hasil survey harga pangan harian di pasar strategis yang ada di Kota Bima				
			Kondisi yang diharapkan adalah angka koefisien varian yang kecil karena semakin rendah angka koefisien varian berarti harga pangan (beras) yang semakin stabil.					
		Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	84,5	85	87	88,3	89,6
			Rumus Target:	$\frac{\% \text{ Angka Kecukupan Gizi (AKG)} \times \text{ bobot masing-masing kelompok pangan}}{\text{Target Skor PPH tahun N}} \times 100 \%$				
				PPH Konsumsi dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan				
				Angka kecukupan gizi yang digunakan dengan tingkat nasional pada umumnya mengkonsumsi 2000 kkal dengan keseimbangan taraf persediaan 2000 kkal. Selain itu angka kecukupan protein dalam taraf nasional ditentukan sebanyak 52 gram dan taraf persediaannya 57 gram. Kecukupan gizi untuk pelabelan produk makanan yang dikemas disebut dengan acuan label gizi (ALG).				

3.2.1. Sasaran dan Fokus Kegiatan Tahun 2023

- Pemerataan Kesejahteraan, Penanganan Kemiskinan dan Rawan Pangan:
 - P2L Pengembangan Pangan Lestari (DAK Non Fisik, APBD Prov dan Dana Dekonsentrasi);
 - Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) (APBD, APBD Provinsi dan APBN);
 - Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) (APBD dan APBD Provinsi)
- Stabilitas harga dan Pasokan Pangan:
 - Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) / Toko Tani Indonesia (TTI);
 - Monitoring Harga dan Pasokan Pangan
 - Pemantauan Arus Distribusi Komoditas pangan
 - Cadangan Pangan
 - Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat LDPM)
- Penigkatan Diversifikasi Pangan:
 - Gerakan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
- Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT):
 - Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
- Analisis, Kajian dan Kebijakan
 - Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
 - Monitoring Stok Beras di Penggilingan dan Pedagang
 - Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)
 - Neraca Bahan Makanan (NBM)
 - Prognosa Ketersediaan Pangan

B A B 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

Program Dinas Ketahanan Pangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018-2023.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima 3 (tiga) program utama ketahanan pangan dengan 5 (lima) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan. Dan terdapat 1 program penunjang urusan ketahanan pangan dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Program-program ini guna pendayagunaan potensi ekonomi daerah, utamanya pemanfaatan pangan lokal yang ada di Kota Bima, serta mendukung pencapaian target standar pelayanan minimal (SPM) urusan Ketahanan Pangan yang diharapkan dicapai di tahun 2023.

Pendanaan program dan kegiatan tahun 2023 akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima. Untuk mendukung pencapaian target kinerja OPD akan diupayakan melalui pembiayaan dari dana APBN maupun Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak luar.

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan

No.	Sasaran PD	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3
1.	<i>Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat</i>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Dinas Ketahanan Pangan
2.	<i>Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang keragaman</i>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

No.	Sasaran PD	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan
		Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

No.	Sasaran PD	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota
		Registrasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan
Prioritas Pembangunan Kota Bima 2023

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (000)	Ket.
1	2	3	5	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
Dinas Ketahanan Pangan			3.763.313	
1.	Tata kelola pemerintahan dan pemantapan pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.721.679	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.298	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.204	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	561	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	561	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	341	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	541	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.090	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.383.739	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.258.197	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	122.400	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.285	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	857	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	550	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	550	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.992	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.992	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.633	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.749	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.789	

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (000)	Ket.
1	2	3	5	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.735	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.328	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.121	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.444	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72.395	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.089	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.960	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.023	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.423	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.850	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.000	
2.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	872.920	
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	150.965	
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	50.476	
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16.034	
		Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	51.556	
		Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	32.899	
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	206.013	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	33.931	
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	17.742	
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	129.360	
		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	24.980	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	515.942	
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	88.973	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	426.969	

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

No.	Prioritas Pembangunan	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (000)	Ket.
1	2	3	5	
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	80.000	
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	80.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	80.000	
4.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	88.714	
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	88.714	
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	40.800	
		Registrasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	36.870	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	11.044	

Tabel 4.3
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
 (Tabel C-33 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan
 Perkiraan Maju Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			3.763.370				4.653.804				
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.721.732			100%	3.352.675			
2	9	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	13.298			100%	13.834		
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bima	2 Dokumen	2.204	DAU		2 Dokumen	2.497.132
2	9	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	561	DAU		1 Dokumen	577.830
2	9	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	561	DAU		1 Dokumen	577.830

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	9	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	341	DAU		1 Dokumen	351.230
2	9	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Bima	1 Dokumen	541	DAU		1 Dokumen	557.436
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bima	2 Dokumen	9.090	DAU		2 Dokumen	1.751.618
2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	2.383.739			100%	2.455.382
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bima	39 Orang Bulan	2.258.197	DAU		39 orang	2.325.943
2	9	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bima	112 Dokumen	122.400	DAU		9 Orang	126.072.000
2	9	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bima	1 Laporan	2.285	DAU		1 Dokumen	2.353.550
2	9	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bima	4 Laporan	857	DAU		2 Dokumen	985.710
2	9	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	550			100%	950

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Daerah pada Perangkat Daerah												
2	9	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	550	DAU		1 Dokumen	950
2	9	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		100%	4.992			100%	10.141
2	9	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bima	30 orang/bulan	4.992	DAU		30 orang	10.141
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	182.633			100%	320.800
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Penatoi	1 Paket	1.749	DAU		3 Jenis	2.000
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Penatoi	1 Paket	26.789	DAU		10 Jenis	27.000
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Penatoi	1 Paket	4.735	DAU		250 orang/kali	8.000
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Penatoi	2 Paket	23.328	DAU		8 Jenis	33.000
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/ Kota	10 Laporan	126.121	DAU		17 kali	250.000
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	104.444				113.066

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Pemerintahan Daerah												
2	9	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa surat menyurat	Kelurahan Penatoi	12 Laporan	72.395	DAU		5 Orang Bulan	74.566
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan kebersihan kantor	Kelurahan Penatoi	12 Laporan	29.089	DAU		4 Jasa/ bulan	35.000
2	9	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Kelurahan Penatoi	1 Laporan	2.960	DAU		22 Jenis	3.500
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	32.023			100%	438.500
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bima	1 Unit	8.423	DAU		1 Unit	28.000
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Unit	2.850	DAU		11 Unit	5.000
2	9	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bima, Semua Kecamatan,	8 Unit	4.750	DAU		8 Unit	5.500

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Semua Kelurahan						
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	16.000	DAU		1 Unit	400.000
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan energi		2692 kka/ kap/ hari	872.920			2.692	1.224.778
						Angka ketersediaan protein		67,68 gram/ kap/ hari					67,68
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan pokok terhadap kebutuhan daerah		20%	150.965			20%	247.000
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	50.476	DAU		2 Dokumen	60.000
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	16.034	DAU		10 kelompok	17.000
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	51.556	DAU		17 komoditi	100.000
2	9	3	2.01	6	Pengembangan Kelembagaan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko	Semua Kabupaten/Kota,	1 Unit	32.899	DAU		4 LDPM	70.000

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Tani Indonesia yang Dikembangkan	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan pemerintah yang tersedia dan dikelola terhadap total kebutuhan daerah		20%	206.013			18 ton	348.000
2	9	3	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	33.931	DAU		2 kali	50.000
2	9	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 dokumen	17.742	DAU		1 Dokumen	18.000
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Ton	129.360	DAU		18 ton	250.000
2	9	3	2.02	4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Ton	24.980	DAU		18 ton	30.000
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah konsumsi energi		2.288 kka/ kap/ hari	515.942			2.292 kka/ kap/ hari	529.778
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kota Bima, Semua Kecamatan,	1 dokumen	88.973	DAU		1 dokumen	90.000

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					per Kapita per Tahun		Semua Kelurahan						
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	426.969	DAU, DAK		41 kelurahan	439.778
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	Kota Bima	25%	80.000			25%	85.000
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan		10 kelurahan	80.000			10 kelurahan	85.000
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	80.000	DAU		2 Kegiatan	85.000
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Bahan Pangan yang aman Konsumsi	Kota Bima	90%	88.714			90%	91.351
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pangan segar yang diawasi		80%	88.714			80%	91.351
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang dibina	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	40.800	DAU		11 kelompok	42.000
2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	36.870	DAU		25 petani/ pelaku usaha	37.976

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	11.044	DAU		1 unit	11.375

BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 mengacu pada.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023.
3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renja SKPD dengan Renstra SKPD, serbagaimana konsistensi antara Perubahan Renstra SKPD dengan Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2019-2023;
4. Pada setiap tahun anggaran dilakukan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja dan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tahun berikutnya. Evaluasi dimaksud dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Kegiatan, indikator, target kinerja, dan pagu anggaran disusun dalam matrik dan bersifat indikatif untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima akan selalu berupaya maksimal untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima sesuai tugas pokoknya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia.

Ditetapkan di Raba - Bima

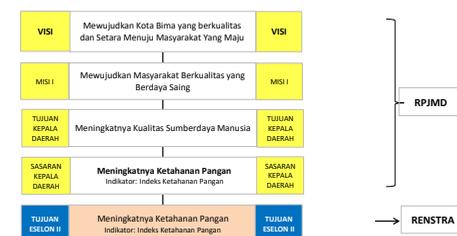
Pada tanggal,

2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Bima,


Ichwanul Muslimin. SP, MM
Pemina IV.a
NIP. 19720229 200501 1 005

POHON KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

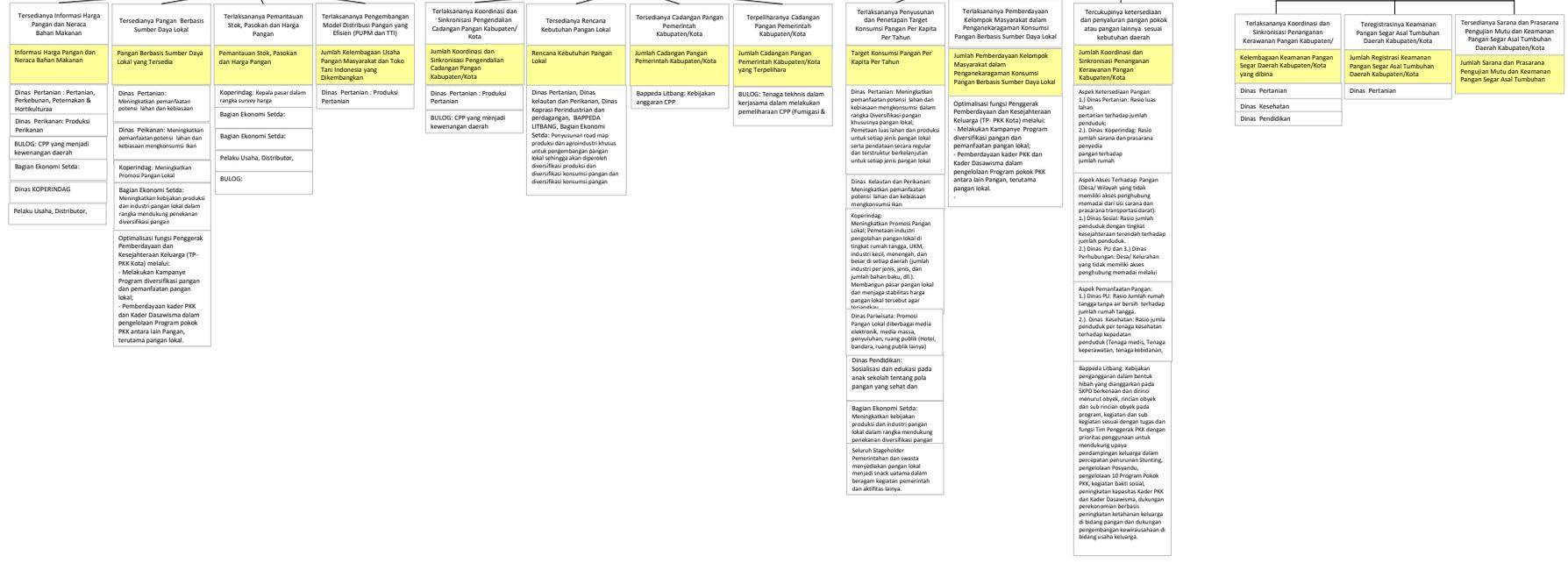
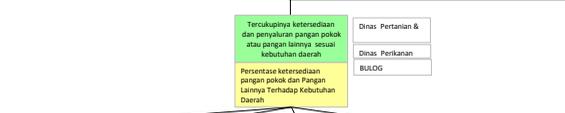
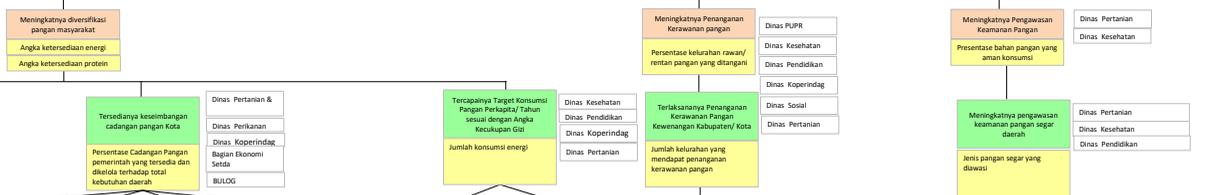
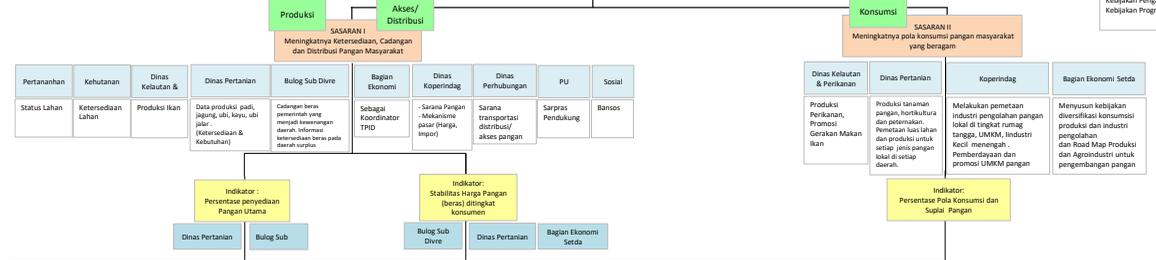


RPIMD

RENSTRA



BPAD: Bappeda Litbang
Kebijakan Penganggaran; Kebijakan Program





PEMERINTAH KOTA BIMA

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gajah Mada No. 92 Kel. Penatoi Kec. Mpunda, email : dkpkotabima17@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

NOMOR : 521/ 36 /DISHANPAN/ VIII /2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA TAHUN 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dipandang perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023;

8. Peraturan Walikota Bima Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 735).9.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2023;
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2023 sebagaimana terkantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA sebagai acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raba - Bima
Pada Tanggal : Agustus 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Bima,



Ichwanul Muslimin. SP, MM
Pembina IV.a
NIP. 19720229 200501 1 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

Nomor : 521/ 36 /DISHANPAN/ VIII /2022

Tanggal : 8 Agustus 2022

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Taun 2023

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
2	3	4	5	6	7	8	9
SASARAN OPD							
1. Meningkatkan Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat	1.1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama	<p>Ketersediaan Pangan =</p> $\frac{\sum \text{Kesediaan pangan utama tahun N (Kg)}}{\sum \text{Kebutuhan pangan}} \times 100$ <p>Definisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Jumlah ketersediaan pangan di Kota Bima adalah hasil penjumlahan dari CPP Kota Bima, Cadangan Pangan di masyarakat, Lumbung pangan di masyarakat (LPM), Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Penggilingan/Pengusaha, Persediaan Beras Perum Bulog Sub Devisi Wilayah Kota Bima (GBB> Jatiwangi) yang menjadi kewenangan Kota Bima. <ol style="list-style-type: none"> Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah cadangan pangan milik dan dikelola oleh pemerintah daerah, yang memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. <ul style="list-style-type: none"> Penentuan CPP Kota Bima = 80% x Cad. Beras Total Prov x \sum Pdd Kota Bima thd \sum Pdd Prov, cadangan pangan pemerintah, minimal 25 ton ekuivalen beras 	BPS, Bulog, Dinas Pertanian dan Peternakan, Distributor/ Pelaku Usaha, Lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka ketersediaan energi	<p>Ketersediaan Energi (Kkal/ Kapita/ Hari)=</p> $\frac{\sum \text{Kesediaan pangan /kap./hari}}{100} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}$ <p>Angka Ketersediaan Energi: Adalah dihasilkan dari 11 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan energi pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat.</p> <p>BDD = Bagian yang Dapat Dimakan</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan pangan per Kkal/ Kapita/ hari Hari sumbernya dari daftar komposisi bahan makanan Standar ketersediaan energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari Sumber : Neraca Bahan Makanan 	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima. Kapala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
2	3	4	5	6	7	8	9
	1.2. Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	<p>b. Cadangan Pangan masyarakat: persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat atau rumah tangga, termasuk, petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen beras ditingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal; <p>c. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara kelompok.</p> <ul style="list-style-type: none"> - LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat), jumlah ketersediaan pangan (beras) di LDPM; • Penggilingan/pengusaha, ketersediaan pangan (beras) di penggilingan yang berada di Kota Bima <p>d. Persediaan Beras Perum Bulog sub Divre Wilayah Kota Bima (GBB.Jatiwangi) yang menjadi peruntukan Kota Bima.</p> <p>3. Kebutuhan Pangan adalah: Kebutuhan pangan adalah jumlah konsumsi per kapita per tahun yang menjadi standar Provinsi NTB adalah 120 kg di kalikan dengan jumlah penduduk Kota Bima Tahun N. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:</p> $\text{Kebutuhan Pangan Utama Kota Bima} = \text{Konsumsi Per Kap.Per .thX} \sum \text{Penduduk}$ $\text{CV} = \frac{\text{Std. Deviasi Harga Pangan}}{\text{Rata-Rata Harga Pangan Tahun Berjalan}} \times 100$ <p>Definisi:</p> <p>a. Stabilitas Harga adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga.</p> <p>b. Klasifikasi : Target nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di tingkat konsumen untuk Tahun 2020 ditetapkan di bawah 10 (Untuk komoditas beras)</p> <p>c. Std. Deviasi Harga Pangan adalah nilai statistik harga pangan yang dipakai guna menentukan seberapa dekat data harga pangan dari suatu sampel statistik harga pangan dengan data mean atau rata-rata harga pangan. Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan, adalah nilai rata harga pangan pada tahun berjalan.</p> <p>d. Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan adalah: rata-rta harga pangan beras dalam satu tahun.</p>	DISPERINDAG, Pelaku Usaha di pasar strategis (Pasar Raya Amahami, Pasar Lama, Pasar Raba)	<p>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</p> <p>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</p>	<p>Angka ketersediaan protein</p> <p>Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani</p> <p>Persentase bahan pangan yang aman konsumsi</p>	$\frac{\sum \text{Kesediaan pangan /kap/hari}}{100} \times \text{Kandungan Protein X BDD}$ <p>Angka Ketersediaan Protein, Adalah dihasilkan dari 11 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan Protein pangan yang siap dikonsumsi oleh pendd/masrkt. BDD = Bagian yang Dapat Dimakan Sumber : Neraca Bahan Makanan Sumber Data: Data Konsumsi dari Susenas BPS; Data Produksi Tanaman Pangan; Data Impor dan Ekspor; Data Produksi Perkebunan, peternakan, perikanan; Data Stok diperoleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog); Data Jumlah Penduduk BPS; Laporan hasil identifikasi ketersediaan dan kondisi lumbung pangan.</p> $\frac{\text{Jumlah Kelurahan Rawan/ rentan pangan}}{\text{Jumlah kelurahan yang ditangani}} \times 100 \%$ <p>Kelurahan rawan/rentan pangan adalah kelurahan yang ditetapkan melalui hasil perhitungan dan analisis Peta Rawan/Rentan Pangan (Peta FSVA) sebagai daerah yang masuk kedalam kategori rawan/rentan pangan.</p> $\frac{\text{Jumlah sampel yang aman hasil uji}}{\text{Jumlah sampel yang diambil}} \times 100 \%$	<p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima</p> <p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima; Kabid Kerawanan Pangan</p> <p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima; Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan</p>

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
2	3	4	5	6	7	8	9
2. Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	<p>% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan</p> <p>Definisi:</p> <p>a. Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.</p> <p>b. Klasifikasi : Konsumsi Energi, Konsumsi Protein dan Angka Kecukupan Gizi (AKG).</p> <p>c. % Angka Kecukupan Gizi (AKG): Jumlah energi dan protein yang harus dikonsumsi oleh setiap orang dalam melakukan kegiatan/aktivitas per hari sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\text{Prosentase AKG} = \frac{\text{Energi masing-masing komoditas} \times 100 \%}{\text{Angka Kebutuhan Gizi}} \times 100$ </div> <p>d. Analisis konsumsi pangan berdasarkan data Susenas tahun 2015-2020 menggunakan Angka Kecukupan Energi sebesar 2.150 kkal dan Angka Kecukupan Protein 57 gram.</p> <p>e. Total Konsumsi Energi Penduduk (gram/kap/hari) Total konsumsi energi penduduk diperoleh dari penjumlahan konsumsi energi dari sembilan kelompok pangan. Konsumsi energi setiap kelompok pangan diperoleh dari penjumlahan konsumsi energi dari jenis pangan pada kelompok tersebut. Penghitungan konsumsi energi masing-masing jenis pangan diperoleh dari perkalian antara jumlah (gram) pangan yang dikonsumsi dengan kandungan energi setiap jenis pangan tersebut.</p>	Data Sensusnas, Badan Pusat Statistik				

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Bima,



Ichwanul Muslimin. SP, MM
Pembina IV.a
NIP. 19720229 200501 1 005

